BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Sanksi Pemotongan Penghasilan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paset Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
7. Tambahan penghasilan adalah pendapatan Bupati dan Wakil Bupati, serta PNSD selain gaji, tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional yang didasarkan pada kondisi kerja, beban kerja dan, eselon, pangkat, golongan dan pendidikan, kelangkaan profesi, keahlian khusus serta pertimbangan kapasitas.
8. Waktu kerja efektif adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang dinilai layak untuk diberikan tambahan penghasilan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan dengan maksud untuk peningkatan kesejahteraan dan kinerja Pejabat Negara, PNSD dan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan diberikan Tambahan penghasilan kepada Pejabat Negara, PNSD dan CPNSD dalam rangka memacu dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan diberikan Kepada:

a. Pejabat Negara;
b. PNSD; dan
c. CPNSD.

Pasal 4

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:

a. Bupati; dan
b. Wakil Bupati.

Pasal 5

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri:

a. PNSD Berdasarkan Jabatan Struktural;
b. PNSD Berdasarkan Jabatan Fungsional, meliputi:
    1. Dokter Spesialis;
    2. Dokter Umum/Gigi RSUD;
    3. Dokter Umum/Gigi Puskesmas;
    4. Dokter Hewan;
    5. Bidan/Perawat/Analis/Apoteker/As.Apoteker/Nutrisionist/Sanitarian/Rekam Medis/ Radiografer/Elektromedik/Fisioterafis RSUD;
    6. Bidan/Perawat Puskesmas;
    7. Analis/Apoteker/As.Apoteker/Nutrisionist/Sanitarian/Rekam Medis/Radiografer/ Elektromedik/ Fisioterafis Puskesmas;
    8. Tenaga Fungsional Auditor;
    9. Polisi Kehutanan;
    10. Pemadam Kebakaran;
    11. Satuan Polisi Pamong Praja;
    12. Pengawas Sekolah Dan Kepala Sekolah; dan
    13. Jabatan Fungsional Lainnya.

BAB IV
BESARAN

Pasal 6

(1) Rincian besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

(2) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada CPNSD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan besaran maksimal tambahan penghasilan yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara, PNSD dan CPNSD setiap bulannya setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
MEKANISME

Bagian Kesatu
Perhitungan dan Pengurangan

Pasal 7

Besarnya tambahan penghasilan dihitung berdasarkan kedisiplinan melalui tingkat kehadiran, yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Ketentuan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 8

Pengurangan Tambahan Penghasilan dilakukan berdasarkan tingkat ketidakhadiran kerja PNSD dan CPNSD.

Pasal 9

(1) Perhitungan pengurangan atas tambahan penghasilan dan perhitungan nominal tambahan penghasilan, dilakukan olehp pejabat yang menangani kepegawaian dan keuangan pada masing-masing SKPD.

(2) Penghitungan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan absensi kehadiran.

(3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala SKPD secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 10

Pengajuan pencairan dana tambahan penghasilan disampaikan oleh masing-masing SKPD ke Bendahara Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 11

(1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pejabat Negara, PNSD dan CPNSD.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan sesuai kemampuan likuiditas keuangan daerah.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 12

Dana Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) PNSD yang pindah tugas ke luar daerah dan berstatus pegawai titipan di daerah lain tidak diberikan tambahan penghasilan.

(2) PNS pindahan dari luar daerah yang telah menjadi PNSD, diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah.

(3) Pemberian tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

(1) PNSD yang melaksanakan cuti besar, cuti tahunan, cuti bersalin atau cuti alasan penting, diberikan tambahan penghasilan secara penuh.

(2) PNSD yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan tambahan penghasilan terhitung mulai tanggal berlakunya cuti sampai dengan berakhirnya masa cuti tersebut.

(3) PNSD yang tidak masuk kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan diberikan tambahan penghasilan secara penuh.

(4) PNSD yang melaksanakan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sampai tiga bulan, terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar.

(5) PNSD yang berhalangan tetap, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak diberikan tambahan penghasilan.

(6) PNSD yang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht*), tidak diberikan tambahan penghasilan terhitung pada bulan berikutnya sejak tanggal penahanan (dipenjara).

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan mengenai pemberian Jasa Pelayanan kepada Dokter Umum/Dokter Gigi dan Paramedis/Tenaga Kesehatan di Puskesmas dihapus.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNSD dan CPNSD dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2014.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 16); dan
2. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 April 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 11.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 APRIL 2014

TUNJANGAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP)
PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

I. PEJABAT NEGARA

No.	Jabatan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Bupati	30,000,000/Bulan
2	Wakil Bupati	25,000,000/Bulan
JUMLAH		

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

A. JABATAN STRUKTURAL

No.	Eselon	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Eselon II/a	15,000,000/Bulan
2	Eselon II/b	12,000,000/Bulan
3	Eselon III/a (Ka KANTOR, Direktur RSUD, Camat)	10,000,000/Bulan
4	Eselon III/a	9,000,000/Bulan
5	Eselon III/b	7,500,000/Bulan
6	Eselon IV/a	5,500,000/Bulan
7	Eselon IV/b	4,000,000/Bulan

B. JABATAN FUNGSIONAL

1. DOKTER SPESIALIS

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Golongan IVd	16,152,000/Bulan
2	Golongan IVc	15,959,000/Bulan
3	Golongan IVb	15,789,000/Bulan
4	Golongan IVa	15,624,000/Bulan
5	Golongan IIId	15,177,000/Bulan
6	Golongan IIIc	15,100,000/Bulan
7	Golongan IIIb	15,032,000/Bulan

2. DOKTER UMUM/GIGI RSUD

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Golongan IVd	6,152,000/Bulan
2	Golongan IVc	5,959,000/Bulan
3	Golongan IVb	5,789,000/Bulan
4	Golongan IVa	5,624,000/Bulan
5	Golongan IIId	5,177,000/Bulan
6	Golongan IIIc	5,100,000/Bulan
7	Golongan IIIb	5,032,000/Bulan

3. DOKTER UMUM/GIGI PUSKESMAS

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Golongan IVd	6,152,000/Bulan
2	Golongan IVc	5,959,000/Bulan
3	Golongan IVb	5,789,000/Bulan
4	Golongan IVa	5,624,000/Bulan
5	Golongan IIId	5,177,000/Bulan
6	Golongan IIIc	5,100,000/Bulan
7	Golongan IIIb	5,032,000/Bulan

4. DOKTER HEWAN

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Golongan IVd	4,652,000/Bulan
2	Golongan IVc	4,459,000/Bulan
3	Golongan IVb	4,289,000/Bulan
4	Golongan IVa	4,124,000/Bulan
5	Golongan IIId	3,677,000/Bulan
6	Golongan IIIc	3,600,000/Bulan
7	Golongan IIIb	3,532,000/Bulan

5. BIDAN/PERAWAT/ANALIS/APOTEKER/AS.APOTEKER/NUTRISIONIST/SANITARIAN/ REKAM MEDIS/RADIOGRAFER/ELEKTROMEDIK/FISIOTERAFIS RSUD

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Golongan IVa	4,474,000/Bulan
2	Golongan IIId	4,027,000/Bulan
3	Golongan IIIc	3,950,000/Bulan
4	Golongan IIIb	3,882,000/Bulan
5	Golongan IIIa	3,838,000/Bulan
6	Golongan IId	3,497,000/Bulan
7	Golongan IIc	3,442,000/Bulan
8	Golongan IIb	3,413,000/Bulan
9	Golongan IIa	3,397,000/Bulan

6. BIDAN/PERAWAT PUSKESMAS

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Golongan IVa	4,624,000/Bulan
2	Golongan IIId	4,177,000/Bulan
3	Golongan IIIc	4,100,000/Bulan
4	Golongan IIIb	4,032,000/Bulan
5	Golongan IIIa	3,988,000/Bulan
6	Golongan IId	3,647,000/Bulan
7	Golongan IIc	3,592,000/Bulan

7. ANALIS/APOTEKER/AS.APOTEKER/NUTRISIONIST/SANITARIAN/REKAM MEDIS/RADIOGRAFER/ ELEKTROMEDIK/ FISIOTERAFIS PUSKESMAS

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Golongan IVa	4,474,000/Bulan
2	Golongan IIId	4,027,000/Bulan
3	Golongan IIIc	3,950,000/Bulan
4	Golongan IIIb	3,882,000/Bulan
5	Golongan IIIa	3,838,000/Bulan
6	Golongan IId	3,497,000/Bulan
7	Golongan IIc	3,442,000/Bulan
8	Golongan IIb	3,413,000/Bulan

8. TENAGA FUNGSIONAL AUDITOR

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Golongan IVd	4,952,000/Bulan
2	Golongan IVc	4,759,000/Bulan
3	Golongan IVb	4,589,000/Bulan
4	Golongan IVa	4,424,000/Bulan
5	Golongan IIId	3,977,000/Bulan
6	Golongan IIIc	3,900,000/Bulan
7	Golongan IIIb	3,832,000/Bulan
8	Golongan IIIa	3,788,000/Bulan
9	Golongan IId	3,447,000/Bulan
10	Golongan IIc	3,392,000/Bulan

9. POLISI KEHUTANAN

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Golongan IVd	4,652,000/Bulan
2	Golongan IVc	4,459,000/Bulan
3	Golongan IVb	4,289,000/Bulan
4	Golongan IVa	4,124,000/Bulan
5	Golongan IIId	3,677,000/Bulan
6	Golongan IIIc	3,600,000/Bulan
7	Golongan IIIb	3,532,000/Bulan
8	Golongan IIIa	3,488,000/Bulan
9	Golongan IId	3,147,000/Bulan
10	Golongan IIc	3,092,000/Bulan
11	Golongan IIb	3,063,000/Bulan
12	Golongan IIa	3,047,000/Bulan
13	Golongan Id	2,976,000/Bulan
14	Golongan Ic	2,930,000/Bulan
15	Golongan Ib	2,889,000/Bulan
16	Golongan Ia	2,853,000/Bulan

10. PEMADAM KEBAKARAN

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Golongan IVd	4,152,000/Bulan
2	Golongan IVc	3,959,000/Bulan
3	Golongan IVb	3,789,000/Bulan
4	Golongan IVa	3,624,000/Bulan
5	Golongan IIId	3,177,000/Bulan
6	Golongan IIIc	3,100,000/Bulan
7	Golongan IIIb	3,032,000/Bulan
8	Golongan IIIa	2,988,000/Bulan
9	Golongan IId	2,647,000/Bulan
10	Golongan IIc	2,592,000/Bulan
11	Golongan IIb	2,563,000/Bulan
12	Golongan IIa	2,547,000/Bulan
13	Golongan Id	2,476,000/Bulan
14	Golongan Ic	2,430,000/Bulan
15	Golongan Ib	2,389,000/Bulan
16	Golongan Ia	2,353,000/Bulan

11. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Golongan IVd	3,852,000/Bulan
2	Golongan IVc	3,659,000/Bulan
3	Golongan IVb	3,489,000/Bulan
4	Golongan IVa	3,324,000/Bulan
5	Golongan IIId	2,877,000/Bulan
6	Golongan IIIc	2,800,000/Bulan
7	Golongan IIIb	2,732,000/Bulan
8	Golongan IIIa	2,688,000/Bulan
9	Golongan IId	2,347,000/Bulan
10	Golongan IIc	2,292,000/Bulan
11	Golongan IIb	2,263,000/Bulan
12	Golongan IIa	2,247,000/Bulan
13	Golongan Id	2,176,000/Bulan
14	Golongan Ic	2,130,000/Bulan
15	Golongan Ib	2,089,000/Bulan
16	Golongan Ia	2,053,000/Bulan

12. PENGAWAS SEKOLAH DAN KEPALA SEKOLAH

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
A	**PENGAWAS SEKOLAH**	
1	Golongan IVd	3,452,000/Bulan
2	Golongan IVc	3,259,000/Bulan
3	Golongan IVb	3,089,000/Bulan
4	Golongan IVa	2,924,000/Bulan
5	Golongan IIId	2,477,000/Bulan
6	Golongan IIIc	2,400,000/Bulan
B	**KEPALA SEKOLAH**	
	SLTA/SLTP	
1	Golongan IVd	3,352,000/Bulan
2	Golongan IVc	3,159,000/Bulan
3	Golongan IVb	2,989,000/Bulan
4	Golongan IVa	2,824,000/Bulan
5	Golongan IIId	2,377,000/Bulan
6	Golongan IIIc	2,300,000/Bulan
	SD/TK	
1	Golongan IVd	3,302,000/Bulan
2	Golongan IVc	3,109,000/Bulan
3	Golongan IVb	2,939,000/Bulan
4	Golongan IVa	2,774,000/Bulan
5	Golongan IIId	2,327,000/Bulan
6	Golongan IIIc	2,250,000/Bulan

13. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	*2*	*3*
1	Golongan IVd	3,152,000/Bulan
2	Golongan IVc	2,959,000/Bulan
3	Golongan IVb	2,789,000/Bulan
4	Golongan IVa	2,624,000/Bulan
5	Golongan IIId	2,177,000/Bulan
6	Golongan IIIc	2,100,000/Bulan
7	Golongan IIIb	2,032,000/Bulan
8	Golongan IIIa	1,988,000/Bulan
9	Golongan IId	1,647,000/Bulan
10	Golongan IIc	1,592,000/Bulan
11	Golongan IIb	1,563,000/Bulan
12	Golongan IIa	1,547,000/Bulan
13	Golongan Id	1,476,000/Bulan
14	Golongan Ic	1,430,000/Bulan
15	Golongan Ib	1,389,000/Bulan
16	Golongan Ia	1,353,000/Bulan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR